

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam bidang ekonomi, terdapat keterkaitan antara pertumbuhan pembangunan. Pembangunan di bidang Ekonomi dimaksudkan untuk menjadi jawaban dari tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Dalam pembangunan perekonomian terdapat permasalahan yang sering ditemukan yaitu permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Kedua permasalahan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat, baik dalam segi ekonomi ataupun sosial. Permasalahan pengangguran berarti seseorang tidak bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ketidakterpenuhinya kebutuhan itu akan berdampak kepada kemiskinan, daya beli masyarakat menurun karena tidak punya pendapatan dan pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak sebandingnya jumlah lapangan kerja dengan pertumbuhan output industri menjadi salah satu akibat terjadinya pengangguran.

Todaro (dalam Budiarto & Dewi, 2015) peningkatan angka pengangguran disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja. Selain itu, Sumanto (dalam Awandari & Indrajaya, 2016) mengatakan bahwa masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dari adanya

kegiatan investasi. Seiring dengan itu pendapatan per kapita meningkat sehingga daya beli masyarakat meningkat yang mana kedua itu merupakan komponen terjadinya peningkatan IPM yang menjadi indikator dari kesejahteraan masyarakat.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator kesejahteraan manusia yang disusun oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990. Indikator tersebut disusun berdasarkan faktor-faktor, seperti rata-rata usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) metode perhitungan IPM terdiri dari tiga metode yaitu, lamanya hidup diukur dengan harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan perpaduan antara angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dan tingkat pendapatan diukur dengan Produk Nasional Bruto (PNB).

Fakta menunjukkan bahwa nilai IPM Indonesia lebih rendah dari IPM negara-negara ASEAN lainnya. Nilai IPM Indonesia sebesar 7,18 ditahun 2019 dan dengan nilai tersebut menduduki peringkat ke-107 bersama dengan negara Philipina. Berdasarkan dengan nilai tersebut Indonesia termasuk pada kategori *High Human Development*. Capaian IPM Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga yaitu, Malaysia dengan IPM sebesar 81,0 peringkat ke-62, Brunei Darussalam dengan IPM sebesar 83,8 peringkat ke-47, Thailand dengan IPM sebesar 77,7 peringkat ke-79, dan Singapura dengan nilai IPM sebesar 93,8 peringkat ke-11. Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapure sudah mendapatkan kategori yang lebih tinggi dari Indonesia yaitu *Very High Human Development*. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat

Indonesia masih relatif rendah. Berikut nilai dan kategori IPM Indonesia tahun 2007 sampai 2021:

**Tabel 1.1 Perkembangan Poin dan Kategori IPM Indonesia Tahun 2007-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Poin IPM</b>	<b>Kategori</b>
<b>2007</b>	64,3	Menengah bawah
<b>2008</b>	64,7	Menengah bawah
<b>2009</b>	65,8	Menengah bawah
<b>2010</b>	66,5	Menengah atas
<b>2011</b>	67,3	Menengah atas
<b>2012</b>	68,1	Menengah atas
<b>2013</b>	68,7	Menengah atas
<b>2014</b>	69,0	Menengah atas
<b>2015</b>	69,5	Menengah atas
<b>2016</b>	70,3	Menengah atas
<b>2017</b>	70,7	Menengah atas
<b>2018</b>	71,2	Menengah atas
<b>2019</b>	71,8	Menengah atas
<b>2020</b>	72,6	Menengah atas
<b>2021</b>	73,3	Menengah atas

*Sumber: UNDP, 2022 (diolah)*

Berdasarkan tabel berikut, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pergerakan terus terjadi dari kategori menengah bawah menjadi menengah atas. Pada tahun 2009 IPM Indonesia sebesar 65,8 dengan kategori menengah bawah, namun pada tahun 2010 nilai IPM

Indonesia sebesar 66,5 dengan perubahan kategori menjadi menengah atas. Berdasarkan *report* yang diterbitkan oleh UNDP tahun 2020, setelah sebelumnya IPM Indonesia memiliki nilai 71,8 dan membawa Indonesia menduduki urutan ke 107 dari 189 negara, pada tahun 2020 IPM Indonesia pun menunjukkan peningkatan yang cukup baik dengan nilai 72,6 dengan peningkatan sebesar 37,3 persen dari IPM Indonesia sejak tahun 1990 sampai dengan 2020.

Peningkatan IPM ini tidak lepas dari kontribusi berbagai bidang. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan *public goods*. Infrastruktur sebagai salah satu bentuk *public goods* (Rahutami, 2010). Menurut *World Bank* (dalam Tussa'diah, 2019) infrastruktur dibedakan menjadi tiga jenis diantaranya: *Pertama* infrastruktur dibidang ekonomi seperti jalan yang menjadi urat nadi penghubungan kehidupan masyarakat di dalamnya terdapat transportasi yang mempermudah dan mempercepat arus lalu lintas perdagangan. *Kedua* infrastruktur dibidang sosial, seperti Kesehatan dan Pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. *Ketiga* infrastruktur dibidang administrasi di dalamnya terdapat penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi. Pembangunan infrastruktur memerlukan kolaborasi antara sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dalam prosesnya akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Andhika (2017) mengatakan bahwa *public goods* menggambarkan kunci dari kualitas hidup dan keseimbangan lingkungan. Kekurangan barang publik akan mempengaruhi pembangunan ekonomi, mengancam stabilitas politik, perdamaian, dan kemakmuran serta dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengentas kemiskinan suatu negara. Setiap negara mempunyai perlakuan yang berbeda dalam

mengelola barang publiknya, namun tetap berpacu pada tujuan utama untuk menjamin ketersediaan barang publik dan manfaat yang diharapkan dari adanya ketersediaan tersebut. Namun keadaan tidak selalu mulus, masalah akan muncul jika barang publik sudah diprivatisasi, sehingga adanya ikut campur pihak swasta untuk mengelolanya. Keikutsertaan pihak swasta terjadi karena kekurangan anggaran pemerintah dan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola barang publik. Tidak adanya pilihan lain bagi masyarakat sehingga terpaksa masyarakat harus membeli atau membayar guna untuk menggunakan barang publik dengan harga yang mahal yang mana tidak sebanding dengan kualitasnya. Sebagai contoh, kualitas jalan. Kondisi sarana transportasi ini telah menimbulkan banyak kerugian. Para supir truk, pengusaha, dan masyarakat merasakan proses distribusi yang melelahkan dan memakan banyak tenaga, waktu, dan uang. *Public goods* sudah tidak dapat dikatakan sebagai *public goods* jika dalam pelaksanaannya masih terdapat peras swasta.

Ada berbagai contoh dari *public goods* salah satunya yang sering digunakan dan penting adanya adalah jalan. Sebagai penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain, adanya jalan menjadi salah satu penarik bagi investor untuk melakukan investasi. Terdapat dua alasan jalan menjadi penarik bagi investor menurut Laen Sugi Rante Tandung (dalam Tussa'diah, 2019) yaitu: investor akan tertarik berinvestasi apabila tersedianya infrastruktur jalan yang memadai (*investment follows the ship*) dan investor akan tertarik untuk menambah investasinya apabila pembangunan terhadap infrastruktur jalan terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan perekonomian (*ship follow the investment*). Investasi

merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi terdiri dari dua jenis, yaitu investasi fisik dan investasi finansial. Dalam Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kegiatan investasi fisik tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pembentukan modal atau yang sering juga disebut dengan investasi fisik merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu pembentukan modal adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). Keberadaan PMTB berkaitan erat dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang digunakan dalam proses produksi, contohnya seperti bangunan dan konstruksi lain, perlengkapan, mesin, kendaraan, dan barang modal lainnya.

**Tabel 1.2 Data Perkembangan Panjang Jalan dan Investasi di Indonesia  
Tahun 2007-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Panjang jalan (km)</b>	<b>Investasi (miliar)</b>
2007	421,535	1821706,60
2008	437,759	1956318,11
2009	476,337	2090929,61
2010	487,314	2127840,68
2011	492,398	2316359,10
2012	501,969	2527728,79
2013	508,000	2654375,04
2014	518,248	2772470,77
2015	529,073	2911355,98
2016	537,838	3041584,68
2017	539,353	3228763,01
2018	542,310	3444310,25
2019	544,474	3597664,13
2020	558,467	3419181,61
2021	565,443	3549218,80

*Sumber: BPS,2020 (diolah)*

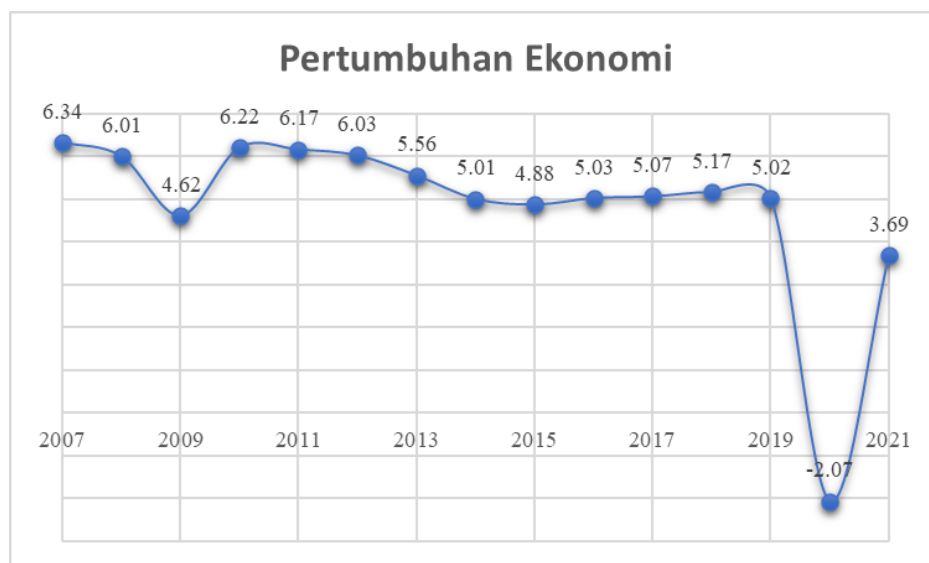
Peningkatan panjang jalan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut didukung karena adanya program prioritas Kementerian Perhubungan yang salah satu diantaranya adalah mendukung konektivitas logistik

wilayah Indonesia Timur dengan adanya tol laut. Hal tersebut juga didukung dengan memperluas cakupan wilayah pedalaman dan menyinergikan moda lain sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat tidak terlalu lebar (Kementrian Perhubungan, 2020)

Tabel diatas juga menunjukkan perkembangan panjang jalan dan investasi di Indonesia dari tahun 2007-2021 dimana panjang jalan yang ada tidak sejalan dengan investasi yang dilakukan. Selama 13 tahun terakhir panjang jalan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya investasi. Namun pada tahun 2020 bertambahnya jalan tidak sejalan dengan bertambahnya investasi dimana panjang jalan mengalami peningkatan menjadi 558.467 km dan investasi mengalami penurunan menjadi sebesar 341.918.161 rupiah.

Aktivitas investasi memungkinkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, peranan ini berasal dari tiga fungsi penting investasi. Pertama, investasi sebagai komponen pengeluaran agregat hal itu berarti jika investasi mengalami kenaikan maka agregat dan pendapatan nasional pun meningkat sehingga akan diikuti oleh pertumbuhan penduduk dan kesempatan kerja. Kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang akan mendorong pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja. Ketiga, investasi selalu berkaitan dengan teknologi yang akan memberikan sumbangsih atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat (Herlambang, 2001 dalam Rizki & Haryadi, 2021).

Penambahan output dan pendapatan akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Samuelson dan Nordhaus (dalam Tussa'diah, 2019) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dari perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan perekonomian dari satu periode terhadap periode selanjutnya. Ekspansi GDP potensial atau output yang nantinya mencerminkan pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Sederhananya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka kesempatan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terpenuhi kebutuhan hidup masyarakat artinya masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya.



**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2021**

*Sumber: BPS (diolah)*

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2021 mengalami keadaan yang berfluktuatif. Perkembangan yang berfluktuatif tersebut dipengaruhi oleh berbagai



kebijakan ekonomi global dan perkembangan ekonomi domestik Indonesia. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDB mengalami penurunan cukup drastis menjadi sebesar 4,62% tersebut dikarenakan pengaruh ekspor yang mencatat pertumbuhan negatif dan lambatnya pertumbuhan investasi (Bank Indonesia, 2010).

Pada tahun 2010, laju pertumbuhan PDB mengalami kenaikan sebesar 6,22 persen seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik Indonesia. Penurunan laju pertumbuhan PDB terus berlanjut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,88 persen. Keadaan terus membaik setelahnya, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, laju pertumbuhan PDB Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan nilai perolehan laju PDB sebesar 5,17 persen. Namun, peningkatan laju PDB itu tidak berlangsung lama, pada tahun 2019 sampai dengan 2020 laju pertumbuhan PDB Indonesia mengalami penurunan dengan 5,02 persen pada tahun 2019 dan -2,07 persen pada tahun 2020. Penurunan laju PDB secara dratis tersebut disebabkan karena adanya kondisi pandemi yang sangat mempengaruhi perekonomian global dan domestik Indonesia. Seiring dengan keadaan pandemi yang sudah dapat dikendalikan, laju pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2021 pun kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,69 persen. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas, dan akselerasi ekonomi keuangan digital (Bank Indonesia, 2021).

Menurut Muhtarom (dalam Rizki & Haryadi, 2021) mengatakan bahwa dengan adanya investasi memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Menurut Sulityowati (dalam

Awandari & Indrajaya, 2016) sumberdaya manusia yang efektif merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja diartikan sebagai banyaknya jumlah penduduk yang bekerja dan peran masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan, kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesempatan kerja di Indonesia disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1.I.2 Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun 2007-2021**

*Sumber: BPS (diolah)*

Berdasarkan gambar 1.2 tingkat kesempatan kerja di Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2021 berfluktuasi. Kenaikan terus terjadi disetiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat kesempatan kerja di Indonesia sebesar 94.70 persen. Kemudian terjadi kenaikan di tahun 2019 menjadi 94.77 persen. Namun akhirnya terjun bebas di tahun 2020 menjadi 92,93 persen hal tersebut mengingat karena adanya dampak pandemi covid-19 melanda dunia. Namun, keadaan terus membaik dan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja di Indonesia, tahun 2021 berhasil mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 93.73 persen.

Sehingga dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pada hakikatnya pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Awandari dan Indrajaya, 2016). Untuk mencapai hakikat tersebut ditopang dengan ketersediaan *public goods* yang menunjang dan merata di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut nantinya bisa menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal akan menghasilkan investasi yang akan menambah stok modal (*capital stock*) yang mana nantinya produktivitas, kapasitas, dan kualitas produksi meningkat yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “***Pengaruh Public Goods, Investasi, dan Pertumbuhan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja di Indonesia***”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh *publis goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021?
- b. Bagaimana pengaruh *public goods*, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia Tahun 2007-2021?

- c. Apakah *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021
- b. Mengetahui pengaruh *public goods*, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia Tahun 2007-2021
- c. Mengetahui pengaruh tidak langsung *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan studi empiris sehingga menambah generalisasi hasil studi sebelumnya
- b. Menambahkan informasi dan bukti-bukti bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan *public goods*, investasi, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

## **1.5 Kegunaan Hasil Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran guna untuk memperkaya ilmu penelitian ekonomi publik
- b. Memberikan inovasi dalam metode penelitian guna untuk meningkatkan penelitian
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan kebijakan terutama pada kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh *public good*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja Indonesia Tahun 2007-2021.

- b. Bagi akademisi

Menghasilkan penelitian yang dapat menjelaskan hubungan pengaruh *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.

- c. Bagi pembaca

Memberikan penjelasan, pengetahuan, dan sumber referensi hubungan pengaruh *public goods*, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja di Indonesia Tahun 2007-2021.

